



PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER

**PERUBAHAN
RENCANA STRATEGIS
(RENSTRA) TAHUN 2016-2021**

KECAMATAN SEMBORO

TAHUN 2017

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, akhirnya dokumen Rencana Strategis Perubahan Kecamatan Semboro Tahun 2016-2021 ini dapat diselesaikan. Tersusunnya dokumen perencanaan untuk Kecamatan Semboro ini berkat Kerja sama yang baik dan harmonis dari semua pihak yang berkepentingan.

Maksud disusunnya Renstra Perubahan ini adalah untuk memberikan gambaran program kerja perubahan yang direncanakan dan disusun dan bagaimana cara mencapainya, juga memberikan gambaran aktivitas kegiatan tahunan yang dilaksanakan oleh Kecamatan Semboro dan dalam rangka menyelaraskan dan mengintegrasikan arah program dan kegiatan sesuai tugas dan fungsi Kecamatan selama 5 (lima) tahun kedepan dengan RPJMD Kabupaten Jember tahun 2016-2021.

Sedangkan tujuan disusunnya Renstra Perubahan adalah sebagai pedoman dalam penyusunan Renja Perubahan Kecamatan Semboro dengan mengacu pada prioritas pembangunan daerah dan pagu indikatif berdasarkan RPJMD juga sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kegiatan Anggaran (RKA) Perubahan tahunan Kecamatan Semboro dan sebagai dokumen perencanaan dan untuk menjamin kegiatan dilaksanakan sesuai visi, misi dan tujuan serta sasaran organisasi.

Akhir kata, kami sampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan sumbangan pemikiran, ide dan tenaga semoga dokumen Renstra Perubahan Kecamatan Semboro ini bermanfaat bagi semuanya.



NIP. 19670503 199901 1 002

DAFTAR ISI

	Hal :
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum	2
1.3. Maksud dan Tujuan	3
1.4. Sistematika Penulisan	4
BAB II. GAMBARAN PELAYANAN OPD	6
2.1. Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi Kecamatan Semboro	6
2.2. Struktur Organisasi Kecamatan Semboro	6
2.3. Sumber Daya Kecamatan Semboro	14
2.4. Kinerja Pelayanan Kecamatan Semboro	20
2.5. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Kecamatan Semboro	24
BAB III. ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI	27
3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Kecamatan Semboro	27
3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kerja Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih	28
3.3. Telaahan Renstra	28
3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Strategis	29
3.5. Isu Strategis Kecamatan Semboro	32
BAB IV. VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN, STRATEGIS DAN KEBIJAKAN	33
4.1 Visi dan Misi SKPD	33
4.2. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah SKPD	33
4.3. Startegi dan Kebijakan SKPD	34
BAB V. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA,	

KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF	35
5.1 Rencana Program dan Kegiatan	35
5.2 Kegiatan	36
BAB VI. INDIKATOR KINERJA KECAMATAN SEMBORO YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD	38
BAB VII. PENUTUP.	39

LAMPIRAN

1. MATRIK TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN
2. INDIKATOR KINERJA UTAMA
3. MATRIK RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF YANG MENGACU KEPADA TUJUAN DAN SASARAN
4. MATRIK RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF PROGRAM-PROGRAM RUTIN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perencanaan sebagai salah satu unsur dalam proses manajemen memegang peranan yang sangat penting dalam rangka pencapaian tujuan organisasi, baik itu organisasi pemerintah maupun non pemerintah. Perencanaan yang baik tentunya disusun melalui suatu proses dan analisis serta berorientasi pada visi dan misi organisasi. Sistem perencanaan yang efektif sangat diperlukan karena 2 (dua) alasan yaitu (1) untuk merespon perubahan lingkungan eksternal dan (2) untuk mengorganisir sumber daya bagi peningkatan kinerja. Inti kegiatan perencanaan adalah menyusun program kerja yang jelas dan dapat diimplementasikan sehingga menjamin keberlangsungan hidup organisasi dalam lingkungan yang senantiasa berubah-ubah.

Sebagaimana yang diamanatkan Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dijelaskan bahwa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Organisasi Perangkat Daerah merupakan Rencana Strategi Organisasi Perangkat Daerah (Perubahan Renstra SKPD), dimana Perubahan Renstra adalah dokumen perencanaan Organisasi Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun, sedangkan strategi itu sendiri adalah langkah-langkah yang berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi Organisasi Perangkat Daerah.

Kecamatan Semboro dalam menjabarkan RPJMD Kabupaten Jember Tahun 2016-2021 berkewajiban menyusun Rencana Strategis Kecamatan Semboro Tahun 2016-2021 yang memuat visi dan misi dalam mendukung program pembangunan Bupati dengan berlandaskan tugas pokok dan fungsinya.

Dalam era otonomi yang berorientasi pada kemandirian daerah sesuai semangat yang tertuang pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah maka azas-azas transparansi dan akuntabel dengan melibatkan partisipasi pemangku kepentingan harus menjadi dasar utama dalam upaya mewujudkan tujuan pembangunan daerah dalam mengeksplorasi potensi-potensinya dengan optimal.

Rencana Strategis Perubahan Kecamatan Semboro dirumuskan dan disusun berdasarkan :

- ~Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Jember 2016-2021
- ~Tugas pokok dan fungsi Kecamatan Semboro
- ~Dokumen-dokumen perencanaan lainnya
- ~Memperhatikan aspirasi dan isu yang berkembang
- ~Berbagai kebijakan Pemerintah Kabupaten Jember

Proses perencanaan strategik lebih bersifat konseptual. Komponen penting dalam perencanaan strategik adalah visi, misi, tujuan, sasaran serta cara mencapai tujuan dan sasaran tersebut.

B. Landasan Hukum

Dasar hukum yang menjadi payung dan digunakan dalam penyusunan Perubahan Renstra pada Kecamatan Semboro adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah

3. Lampiran 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Tahapan Dan Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah (PERUBAHAN RENSTRA SKPD)
4. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 050/795/SJ Tanggal 4 Maret 2016 Tentang Penyusunan RPJMD dan RKPD Tahun 2017
5. Surat Edaran Bupati No. 050/406/310/2006 tanggal 8 April 2016
6. Peraturan Bupati Jember No. 61 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan di Kabupaten Jember.

C. Maksud dan Tujuan

1. Maksud

Maksud disusunnya Perubahan Renstra adalah sebagai gambaran program kerja yang direncanakan dan disusun dan bagaimana cara mencapainya dengan mengetengahkan faktor-faktor kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman dengan pendekatan analisis SWOT, memberikan gambaran aktivitas kegiatan tahunan yang dilaksanakan oleh Kecamatan Semboro dan dalam rangka menyelaraskan dan mengintegrasikan arah program dan kegiatan sesuai tugas dan fungsi Kecamatan selama lima tahun kedepan dengan RPJMD Kabupaten Jember tahun 2016 - 2021.

2. Tujuan

Tujuan disusunnya Perubahan Renstra adalah sebagai pedoman dalam penyusunan Renja Kecamatan Semboro dengan mengacu pada prioritas pembangunan daerah dan pagu indikatif berdasarkan RPJMD juga sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kegiatan Anggaran (RKA) tahunan Kecamatan Semboro dan sebagai dokumen perencanaan dan untuk menjamin kegiatan dilaksanakan sesuai visi, misi dan tujuan serta sasaran organisasi.

D. Sistematika Penulisan

Perubahan Renstra Kecamatan Semboro Tahun 2016 - 2021 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I	PENDAHULUAN	:	Latar Belakang, Landasan Hukum, Maksud dan Tujuan serta Sistematika Penulisan.
BAB II	GAMBARAN PELAYANAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH	:	Memuat Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi Organisasi Perangkat Daerah, Sumber Daya Organisasi Perangkat Daerah, Kinerja Pelayanan Organisasi Perangkat Daerah serta Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Organisasi Perangkat Daerah
BAB III	ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI	:	Mencakup Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi Organisasi Perangkat Daerah, Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih serta Telaahan Perubahan Renstra
BAB IV	TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN	:	Mengemukakan Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Organisasi Perangkat Daerah serta Strategi dan Kebijakan Jangka Menengah Organisasi Perangkat Daerah
BAB V	RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN	:	Menggambarkan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif

PENDANAAN
INDIKATIF

BAB VI	INDIKATOR KINERJA : ORGANISASI PERANGKAT DAERAH YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH	Menunjukkan Indikator Kinerja Organisasi Perangkat Daerah yang secara langsung juga menggambarkan kinerja yang akan dicapai Organisasi Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Jember
--------	--	---

MENYAJIKAN TABEL

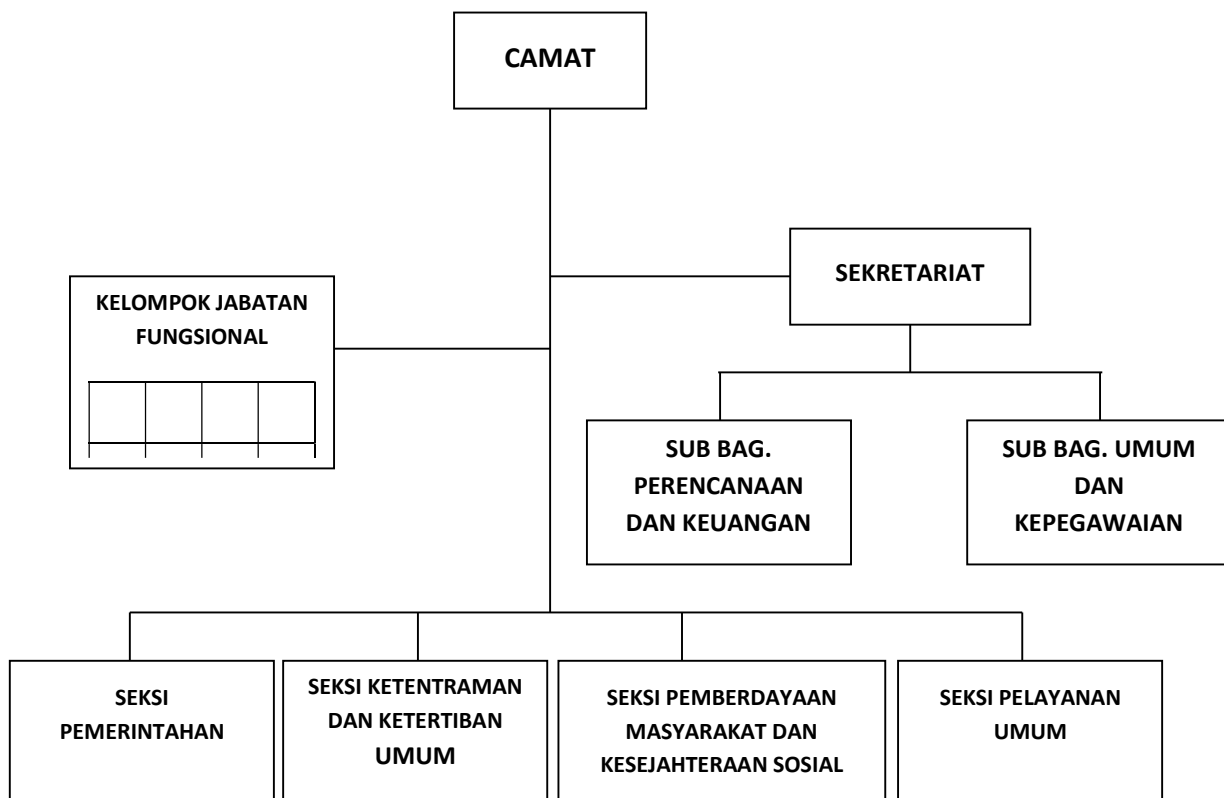
BAB VII	PENUTUP
---------	---------

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH

A. Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi Organisasi Perangkat Daerah

Berkaitan dengan hal tersebut diatas serta berangkat dari pemahaman pada Tugas Pokok dan Fungsi (TUPOKSI) yang berdasarkan Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Jember Nomor 61 Tahun 2016 tanggal 1 Desember 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan di Kabupaten Jember, maka dapat diketahui bahwa Organisasi Kecamatan Semboro adalah terdiri dari :



Berkaitan dengan hal tersebut diatas serta berangkat dari pemahaman pada Tugas Pokok dan Fungsi (TUPOKSI) yang berdasarkan Peraturan Bupati Jember (PERBUP) Nomor 61 Tahun 2016 tanggal 1 Desember 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan di Kabupaten Jember, maka dapat diketahui bahwa Organisasi Kecamatan Semboro adalah terdiri dari :

- a. Camat
- b. Sekretaris Kecamatan
 - b.1. Sub Bag Perencanaan dan Keuangan
 - b.2. Sub Bag Umum dan Kepegawaian
- c. Seksi Pemerintahan
- d. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum
- e. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Sosial
- f. Seksi Pelayanan Umum
- g. Kelompok Jabatan Fungsional

1. Camat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a mempunyai tugas :

- a. Menyelenggarakan urusan pemerintahan umum
- b. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat
- c. Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum
- d. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati
- e. Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum
- f. Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di Kecamatan
- g. Membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan Desa dan/atau Kelurahan.

- h. Melaksanakan penyelesaian permasalahan pelayanan pemerintahan di wilayah kecamatan
- i. Melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Perangkat daerah yang ada di Kecamatan
- j. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

2. Sekretariat

Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris Kecamatan yang mempunyai tugas melaksanakan urusan administrasi dan urusan rumah tangga terhadap seluruh unsur yang meliputi perencanaan Kepegawaian, Keuangan, urusan umum dan tugas lain yang diberikan oleh Camat.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Sekretaris Kecamatan mempunyai fungsi meliputi :

- a. menyusun rencana, pengendalian dan pengevaluasian pelaksanaannya;
- b. menyelenggarakan urusan administrasi Keuangan;
- c. menyelenggarakan urusan Tata Usaha, administrasi Kepegawaian, Perlengkapan dan Rumah Tangga.

Sekretariat terdiri dari :

2.1 Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan

Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas melaksanakan program perencanaan Anggaran, Pendapatan dan Belanja Kecamatan dan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Kecamatan.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai fungsi meliputi :

- a. menghimpun dan mengolah bahan-bahan untuk penyusunan anggaran baik anggaran belanja langsung maupun tidak langsung;
- b. menyiapkan penyusunan rancangan anggaran pendapatan dan belanja Kecamatan;
- c. melakukan perencanaan Intensifikasi serta ekstensifikasi pemungutan dan penerimaan Pajak;

- d. menyusun perencanaan program dan kegiatan Kecamatan;
- e. melakukan analisa evaluasi dan pengendalian sebagai bahan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan Kabupaten;
- f. mengolah tata usaha keuangan atau pembukuan realisasi anggaran pendapatan dan belanja Kecamatan;
- g. melaksanakan perhitungan anggaran dan evaluasi;
- h. melaksanakan tata usaha pembayaran gaji pegawai;
- i. mengurus keuangan perjalanan dinas maupun administrasi pengelolaan keuangan Kecamatan;
- j. melaksanakan evaluasi dan menyusun laporan bidang keuangan;
- k. menerima dan menyetorkan hasil penjualan pajak daerah dan retribusi daerah ke Kas Daerah
- l. melakukan pembinaan administrasi keuangan.

2.2 Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan administrasi umum, pengadaan maupun urusan rumah tangga dan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Kecamatan.

Untuk melaksanakan tugas tersebut Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi meliputi :

- a. melaksanakan tata usaha umum dan tata usaha Sekretariat;
- b. melaksanakan tata naskah dinas dan tata kearsipan;
- c. melaksanakan urusan rumah tangga dan protokol;
- d. mengurus perbaikan kantor dan bangunan lain milik Kecamatan;
- e. melaksanakan evaluasi dan pelaporan bidang administrasi perkantoran dan perlengkapan;
- f. mengurus kendaraan dan alat-alat angkutan lain milik Kecamatan;
- g. melaksanakan persiapan upacara, pertemuan dan rapat dinas serta persiapan penerimaan dan pengaturan tamu;

- h. menyelenggarakan pengelolaan tata usaha kepegawaian yang meliputi pengumpulan data kepegawaian, buku induk pegawai, mutasi, pengangkatan, kenaikan pangkat;
- i. pemberhentian dan pemindahan, cuti, bebas tugas, kenaikan gaji berkala, pembinaan karier dan pension pegawai di lingkungan Kecamatan;
- j. menyiapkan bahan dan melakukan upaya dalam rangka meningkatkan disiplin dan kesejahteraan pegawai serta pengembangan pendidikan dan latihan pegawai di lingkungan Kecamatan;
- k. menyusun formasi pegawai di lingkungan Kecamatan;
- l. melaksanakan usaha peningkatan mutu pengetahuan dan disiplin pegawai;
- m. menyusun rencana kebutuhan barang perlengkapan dan perbekalan;
- n. melaksanakan tata usaha barang peralatan dan perbekalan;
- o. melaksanakan pengadaan, pembinaan, penggunaan, penggudangan serta pemeliharaan barang peralatan dan perbekalan;
- p. menyiapkan bahan untuk penyusunan alokasi serta melakukan distribusi barang peralatan dan perbekalan.

Masing-masing Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian.

3. Seksi Pemerintahan

Seksi Pemerintahan mempunyai tugas melaksanakan urusan Pemerintahan Umum Desa dan fasilitasi kegiatan politik dalam negeri dan tugas lain yang diberikan oleh Camat.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Seksi Pemerintahan mempunyai fungsi meliputi :

- a. menyusun program dan melaksanakan pembinaan penyelenggaraan Pemerintahan Umum dan Desa;
- b. menyelenggarakan urusan pertanahan dan pengawasan asset daerah di wilayah Kecamatan;

- c. menyusun program dan melaksanakan fasilitasi kegiatan sosial, politik, ideologi dan kesatuan bangsa.

4. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum

Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum mempunyai tugas melaksanakan pembinaan ketentraman dan ketertiban wilayah serta pembinaan Polisi Pamong Praja dan tugas lain yang diberikan oleh Camat.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum mempunyai fungsi meliputi :

- a. menyusun program dan penyelenggaraan Pembinaan ketentraman dan ketertiban umum;
- b. menyusun program dan pembinaan penyelenggaraan Polisi Pamong Praja;
- c. menyusun program dan pembinaan Linmas;
- d. melakukan koordinasi di bidang keamanan dan ketertiban di wilayah Kecamatan;
- e. memantau situasi, kondisi dan menjaga stabilitas kesatuan bangsa dan wawasan kebangsaan;
- f. memantau dan penggalangan bencana alam.

5. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Sosial

Seksi Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pemberdayaan dan peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan dan tugas lain yang diberikan oleh Camat.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Sosial mempunyai fungsi meliputi :

- a. menyusun program dan pemberdayaan kegiatan ekonomi masyarakat;
- b. menyusun program dan pengawasan kegiatan pembangunan fisik di wilayah Kecamatan;
- c. menyusun program dan pembinaan usaha pemberdayaan masyarakat;
- d. menyusun program dan pembinaan usaha kelestarian lingkungan hidup;

- e. menyusun program dan pembinaan dalam upaya meningkatkan peran serta masyarakat dalam penghijauan dan pengendalian pencemaran lingkungan;
- f. memfasilitasi kegiatan pemberdayaan perempuan dan kesejahteraan keluarga;
- g. memfasilitasi kegiatan lembaga keswadayaan masyarakat.
- h. menyusun program percepatan pengentasan kemiskinan di wilayah Kecamatan;
- i. menyusun program dan pembinaan kesejahteraan sosial dan keluarga berencana;
- j. menyusun program dan fasilitasi kegiatan kehidupan beragama;
- k. mengkoordinasikan pelaksanaan pemberian bantuan Pemerintah.

6. Seksi Pelayanan Umum

Seksi Pelayanan Umum mempunyai tugas melaksanakan urusan pelayanan umum kepada masyarakat di wilayah Kecamatan yang meliputi pelayanan dasar di bidang administrasi kependudukan, rekomendasi perijinan, kebersihan serta sarana dan prasarana umum serta fasilitasi kegiatan ekonomi masyarakat dan tugas lain yang diberikan Camat.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Seksi Pelayanan Umum mempunyai fungsi meliputi :

- a. melayani administrasi kependudukan dan catatan sipil;
- b. memfasilitasi penertiban rekomendasi perijinan di wilayah Kecamatan sesuai dengan kewenangan yang ada;
- c. menyusun program pembinaan dan peningkatan pelayanan kebersihan, keindahan dan sanitasi lingkungan;
- d. menyusun program dan pembinaan perbankan, perkreditan, perikanan, peternakan dan kehutanan bersama-sama dengan unit pelaksana teknis di Kecamatan;
- e. menyusun program dan pembinaan industri kecil dan usaha informasi serta meningkatkan kelancaran distribusi hasil produksi di wilayah Kecamatan;

- f. menyusun program dan pembinaan sarana dan prasarana fisik pelayanan umum.

7. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Camat sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

Kelompok jabatan Fungsional terdiri dari :

1. Pengawas Sekolah TK / RA dan SD / MI
Mempunyai tugas pokok menilai dan membina bidang akademis maupun menajerial , penyelenggaraan pendidikan pada sejumlah sekolah tertentu yang menjadi tanggung jawabnya.
2. Penilik Pendidikan Luar Sekolah
Mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, menilai, membimbing dan melaporkan kegiatan penilikan Pendidikan Luar Sekolah.
3. Dokter (Kepala Puskesmas)
 - Mempunyai tugas Merencanakan, Melaksanakan, dan mengkoordinasikan semua kegiatan agar pelayanan kesehatan sesuai standar mutu pelayanan kesehatan
 - Melaksanakan kegiatan upaya pelayanan kesehatan dasar dan rujukan puskesmas
 - Mengkoordinasikan kegiatan pelaksanaan dibidang pembangunan kesehatan meliputi promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif di wilayah kerjanya
 - Melakukan koordinasi dalam upaya pemberdayaan dan penggerakan masyarakat dalam pembangunan kesehatan bersama lintas sektor terkait di wilayah kerjanya
4. Petugas Teknis Lapangan Pertanian
Mempunyai tugas pokok melakukan penyuluhan pertanian yang meliputi persiapan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan serta pengembangan penyuluhan pertanian

5. Petugas Teknis Lapangan Kehutanan
Mempunyai tugas pokok menyiapkan, melaksanakan, mengembangkan, memantau dan mengevaluasi serta melaporkan kegiatan penyuluhan kehutanan
6. Petugas Teknis Lapangan Perternakan dan Perikanan
Mempunyai tugas pokok melakukan kegiatan penyuluhan peternakan dan perikanan yang meliputi persiapan, pelaksanaan, Evaluasi dan pelaporan serta pengembangan penyuluhan peternakan dan perikanan

B. Sumber Daya Organisasi Perangkat Daerah

1. Geografi

Kecamatan semboro adalah bagian wilayah kabupaten jember dengan jarak \pm 36 km dengan pusat kota. Mempunyai luas wilayah 39,33 km², dengan rincian luas per Desa sebagai berikut :

No	Desa	Luas (km ²)
1	Rejoagung	4,57
2	Semboro	6,73
3	Sidomekar	8,79
4	Sidomulyo	7,71
5	Pondokjoyo	6,16
6	Pondokdalem	5,38
Jumlah		39,33

Kecamatan Semboro terdiri dari 6 Desa antara lain :

- Desa Semboro
- Desa Sidomekar
- Desa Rejoagung
- Desa Sidomulyo
- Desa Pondokdalem
- Desa Pondokjoyo

Batas – batas wilayah Kecamatan Semboro sebagai berikut :

- Utara : kecamatan tanggul
- Timur : kecamatan bangsalsari
- Selatan : kecamatan umbulsari
- Barat : kecamatan sumberbaru

2. Demografi

Dalam pelaksanaan roda pemerintahan salah satu komponen yang sangat penting adalah masyarakat/penduduk, yang mana keberhasilan dari suatu pemerintahan bisa dilihat dari peran serta penduduk/masyarakatnya dalam mendukung program-program serta peraturan-peraturan yang telah disusun oleh aparat pemerintah tersebut.

Masyarakat Kecamatan Semboro merupakan penduduk yang heterogen dengan bermacam-macam suku, namun kebhinekaan ini memberikan dinamika tersendiri bagi masyarakat di Kecamatan Semboro.

Adapun jumlah penduduk Kecamatan Semboro hingga tahun 2014 adalah sebagai berikut :

No	Desa	Jumlah Laki-Laki	Jumlah Perempuan	Jumlah
1	Rejoagung	1.090	1.104	2.194
2	Semboro	5.928	6.197	12.125
3	Sidomekar	6.027	6.111	12.138
4	Sidomulyo	3.143	3.194	6.337
5	Pondokjoyo	2.783	2.952	5.735
6	Pondokdalem	2.925	3.062	5.987
Jumlah		21.896	22.620	44.516

3. Sosial Budaya

Pendidikan dan Kesehatan

Kecamatan Semboro merupakan cerminan sebagai salah satu dimensi Kabupaten Jember Sebagai Kota Pendidikan, hal ini seiring dengan makin berkembangnya Kecamatan Semboro dikarenakan luas wilayah dan lahan yang masih tersedia dan seiring dengan berkembangnya penduduk diperlukan sarana pendidikan dan kesehatan yang makin meningkat pula, berikut ini merupakan sarana pendidikan di Kecamatan Semboro sebagaimana tabel di bawah ini :

No	Desa	Negeri	Swasta	Jumlah
1	Rejoagung	2	0	2
2	Semboro	13	1	14
3	Sidomekar	17	1	18
4	Sidomulyo	5	1	6
5	Pondokjoyo	2	2	2
6	Pondokdalem	4	2	6
Jumlah		43	7	50

Sarana Kesehatan di Kecamatan Semboro :

No	Desa	Rumah Sakit	Rumah Bersalin	Poli Klinik	Puskesmas/Pustu	Dokter Praktek
1	Rejoagung	-	-	-	-	-
2	Semboro	-	-	1	-	3
3	Sidomekar	-	-	-	1	2

4	Sidomulyo	-	-	-	-	-
5	Pondokjoyo	-	-	-	-	-
6	Pondokdalem	-	-	-	-	-
Jumlah		-	-	1	1	5

Banyaknya tenaga kesehatan berdasarkan pendekatan domisili di Kecamatan Semboro :

No	Desa	Dokter	Bidan	Mantri Kesehatan	Dukun Bayi	Lainnya
1	Rejoagung	-	2	-	-	-
2	Semboro	3	4	2	5	-
3	Sidomekar	2	2	3	6	-
4	Sidomulyo	-	1	1	5	-
5	Pondokjoyo	-	1	-	5	-
6	Pondokdalem	-	1	1	2	-
Jumlah		5	11	7	22	-

Mengacu pada klasifikasi status pegawai, maka tingkat pendidikan yang ditamatkan oleh pegawai Kecamatan Semboro, adalah sebagai berikut :

Pegawai negeri Sipil (PNS) terdapat :

- 1 Orang berpendidikan S-2
- 5 Orang berpendidikan S-1
- 1 Orang berpendidikan D-3
- 11 Orang berpendidikan SMA/ sederajat

- 0 Orang berpendidikan SMP/ sederajat
- 0 Orang berpendidikan SD/ sederajat

Gambaran tentang kepegawaian pada organisasi Kecamatan Semboro menurut latar belakang pendidikan yang ditamatkan adalah sebagaimana ditunjukkan pada tabel.

Jumlah Pegawai menurut Latar belakang Pendidikan
(Per Desember 2016)

No.	Status Kepegawaian	Unit Kerja di lingkungan Kecamatan Semboro									
		Camat	Sekretariat Kecamatan	Sub Bag	Seksi Pem	Seksi PMD	Seksi Kesos	Seksi PelUM	Seksi Trantib	Fungsional	Staf
1	Pegawai negri Sipil										
1.1	Strata-3	-	-		-	-	-	-	-	-	-
1.2	Strata-2	1	-		-	-	-	-	-	-	-
1.3	Strata-1	-	1	1	1	1	-	-	-	-	1
1.4	Diploma 4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.5	Diploma-3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
1.6	SMA/Sederajat	-	-	-	-	-	1	1	1	-	8
1.7	SLTP/Sederajat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.8	SD/ Sederajat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Rolstat/Sukwan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1	Strata-1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2	SMA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3	SLTP/Sederajat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4	SD/ Sederajat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Jumlah	1	1	1	1	1	1	1	1	-	10

Dari komposisi Pegawai Kecamatan Semboro yang keseluruhan berjumlah 34 Orang terdapat :

- 18 Orang berstatus Pegawai Negeri sipil (PNS) termasuk sekretaris desa
- 17 Orang Non PNS (Roolstat/Sukwan)

Secara lengkap gambaran tentang kepegawaian pada organisasi Kecamatan Semboro menurut status pangkat dan golongan adalah sebagaimana ditunjukkan pada tabel.

Jumlah Pegawai menurut Status, Pangkat dan golongan
(Per Desember 2016)

No.	Status Kepegawaian	Gol/ruang	Unit Kerja di lingkungan Kecamatan Semboro										
			Camat	Sekcam	Sub Bag	Seksi Pem	Seksi PMD	Seksi Kesos	Seksi Pelum	Seksi Trantib	Fungsional	Staf	
1	Pegawai negeri Sipil												
1.1	Pembina Tk. I	IV.b	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2	Pembina	IV.a	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3	Penata Tkt I	III.d	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-
1.4	Penata	III.c	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-
1.5	Penata muda tkt I	III.b	-	-	1	-	-	-	1	1	-	-	1
1.6	Penata Muda	III.a	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
1.7	Pengatur Tkt I	II.d	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
1.8	Pengatur	II.c	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.9	Pengatur Muda tkt I	II.b	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7
1.10	Pengatur Muda	II.a	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.11	Juru Tkt I	I.d	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.12	Juru	I.c	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.13	Juru Muda Tkt I	I.b	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.14	Juru Muda	I.a	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

2	Rolstat/Sukwan		-	-	-	-	-	-	-	-	-	17
	Jumlah		1	1	1	1	1	1	1	1	-	27

C. Kinerja Pelayanan Organisasi Perangkat Daerah

Sejak ditetapkannya Kecamatan menjadi sebuah Organisasi Perangkat Daerah, masing-masing diwajibkan membuat Rencana Strategis yang mengacu pada PERUBAHAN RENSTRA lima tahunan. Adapun Rencana Strategis Kecamatan Semboro bertitik berat pada pencapaian visi misi kecamatan yang telah ditetapkan berupa program dan kegiatan.

Adapun tugas Camat dalam menjalankan tugas sehari-harinya sebagai penyelenggara pemerintahan adalah sebagai berikut :

- a. Camat mempunyai tugas menjalankan kewenangan yang dilimpahkan oleh Bupati;
- b. Memimpin pelaksanaan kebijakan Pemerintah Kota di wilayah kecamatan;
- c. Membantu sekretaris daerah dalam menyiapkan informasi mengenai wilayah kecamatan untuk bahan perumusan kebijakan kepala daerah;
- d. Mengkoordinasikan kegiatan penyelenggaraan pelayanan lintas Desa.

Kebijakan penyelenggaraan pemerintahan Desa diarahkan pada upaya menciptakan pemerintahan di tingkat Desa yang tertib dan kuat guna mendukung laju pembangunan dan pelayanan yang semakin meningkat dan untuk memantapkan kehidupan masyarakat yang dinamis dan terus berkembang.

Kegiatan kecamatan yang dilaksanakan terbagi habis pada sekretariat kecamatan dan seksi-seksi, yaitu :

- a. Pelayanan internal dalam hal ini pelayanan administrasi dalam rangka mewujudkan tertib administrasi Kecamatan Semboro dengan kegiatan : surat

menyurat, pembinaan kepegawaian termasuk disiplin Pegawai Negeri Sipil baik di kecamatan maupun di Desa;

- b. Pelayanan publik/eksternal, yaitu memberikan pelayanan administrasi kemasyarakatan yang diperlukan oleh masyarakat dalam kehidupan yaitu administrasi kependudukan, administrasi pertanahan (SKKT dan PPAT), administrasi sosial kemasyarakatan (nikah, surat miskin, keterangan waris) dan pelayanan lainnya.

1) Pelayanan Administrasi :

Sekretariat Kecamatan :

- a) Pembinaan terhadap administrasi serta organisasi pemerintah kecamatan dan pemberian pelayanan dalam hal tugas-tugas kedinasan;
- b) Pembinaan terhadap semua Pegawai Negeri Sipil di wilayah Kecamatan Semboro dengan mengadakan pengawasan langsung dengan tatap muka, rapat staf baik kepada pejabat eselon IV setiap hari Senin, melaksanakan apel Perlindungan Masyarakat, mengevaluasi kegiatan selama satu minggu dan menyampaikan laporan kegiatan masing-masing terhadap pejabat eselon IV;
- c) Camat melaksanakan pengawasan langsung secara berkala untuk mengunjungi Desa dan dinas instansi lain dalam rangka pembinaan terhadap aparat setempat;
- d) Rapat koordinasi dengan semua instansi yang ada di tingkat Kecamatan Semboro;
- e) Dalam rangka pembinaan Pegawai Negeri Sipil, Camat selalu memberikan perhatian seperti usulan kenaikan pangkat, usulan kenaikan gaji berkala, usul izin belajar, usul pengembangan karier/latihan atau pendidikan, promosi dalam jabatan, cuti dan lain-lain yang dilakukan oleh Camat sesuai dengan Surat Keputusan Bupati tentang pendelagasian kewenangan kepada Camat.

Seksi Pemerintahan :

- a) Pembinaan dan inventarisasi asset-aset pemerintah seperti tanah/gedung kecamatan dan Desa dan tanah-tanah milik pemerintah kota yang ada di wilayah Kecamatan Semboro;
- b) Bersama lurah melaksanakan pembinaan terhadap Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW) dalam wilayah Kecamatan Semboro yang dikukuhkan dengan Surat Keputusan Lurah dan disahkan oleh Camat;
- c) Melaksanakan pembinaan administrasi Desa dengan memberikan petunjuk pengisian buku-buku registrasi Desa;
- d) Melaksanakan pembinaan kepada kolektor Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Desa dan rekapitulasi hasil penagihan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) setiap minggu atau bulan secara rutin dilaporkan ke Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember.

Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum :

- a) Pembinaan keamanan dan ketertiban di wilayah Kecamatan Semboro dan bekerja sama dengan instansi terkait seperti Koramil dan Polsek;
- b) Pembinaan dan pengawasan terhadap kegiatan kemasayarakatn yang berpotensi mempunyai dampak terhadap ketentraman dan ketertiban (deteksi dini) di wilayah Kecamatan Semboro;
- c) Melaksanakan kegiatan pengawasan terhadap penegakan peraturan daerah di tingkat kecamatan yaitu perizinan daerah, salah satunya bagi masyarakat yang melaksanakan kegiatan pembangunan apakah sudah memenuhi ketentuan yang berlaku;
- d) Pembinaan terhadap Pedagang Kaki Lima yang ada di wilayah Kecamatan Semboro;
- e) Pembinaan dan Pengawasan terhadap perkumpulan sosial masyarakat seperti Barisan Pemadam Kebakaran serta

menginventarisasi data jumlah dan keberadaan Barisan Pemadam Kebakaran tersebut.

Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Sosial :

- a) Melaksanakan pembinaan dan pengembangan dibidang ekonomi dan pembangunan;
- b) Meningkatkan swadaya dan partisipasi masyarakat dalam meningkatkan perekonomian dan pelaksanaan pembangunan melalui PNPM Mandiri;
- c) Melakukan koordinasi untuk pelaksanaan Musrenbang tingkat kecamatan.

Pembinaan Kerukunan Beragama :

- a) Pembinaan keagamaan ini dilakukan bersama dan berkoordinasi dengan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kecamatan Semboro;
- b) Pembinaan majelis taklim dihampir setiap masjid dan surau/langgara/mushalla dalam wilayah Kecamatan Semboro;
- c) Pembinaan Badan Amil Zakat/Infaq/Sadaqah dimasing-masing masjid di Desa se-Kecamatan Semboro;
- d) Pembinaan wadah organisasi pemuda melalui karang taruna di semua Desa dalam wilayah Kecamatan Semboro dan bekerja sama dan berkoordinasi dengan FKKT Kabupaten Jember.

2) Pelayanan Masyarakat :

- a) Camat memberikan pelayanan kepada masyarakat melalui PPAT yang berkeinginan untuk merubah status hak atas tanah;
- b) Memberikan pelayanan kepada masyarakat dalam pengesahan/legalisasi keterangan waris;
- c) Memberikan pelayanan kepada masyarakat untuk melegalisasi SKKT

- d) Memberikan pelayanan dalam bidang perizinan lainnya yaitu IMB dan HO;
- e) Memberikan legalisasi Surat Keterangan Nikah;
- f) Memberikan rekomendasi Pengangkatan P3N;
- g) Memberikan rekomendasi dispensasi/pengecualian nikah;
- h) Memberikan rekomendasi permohonan pencarian dana keperluan pembangunan tempat ibadah serta sosial lainnya;
- i) Memberikan rekomendasi Surat Keterangan Tidak Mampu.

D. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD

Tantangan :

tantangan-tantangan yang menghambat terhadap kelancaran pelaksanaan tugas pokok organisasi Kecamatan Semboro dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Tantangan ini terutama datang dari luar sistem organisasi, tetapi sangat berpengaruh terhadap jalannya roda organisasi dalam mencapai keberhasilan. Beberapa tantangan atau ancaman tersebut, diantaranya adalah sebagai berikut:

- a. Perubahan yang terjadi dalam tatanan kehidupan sosial regional, nasional, maupun global serta saling mempengaruhi antara berbagai faktor di dalamnya yang merupakan dimensi yang harus diperhitungkan dalam perencanaan pembangunan daerah :
- b. Semakin kritis dan proaktifnya masyarakat terhadap tuntunan Pembangunan daerah yang menuntut perencanaan yang berkualitas.
- c. Semakin transparannya informasi melalui media elektronik menuntut peran Kecamatan Semboro harus lebih responsif terhadap dinamika pembangunan masyarakat.
- d. Tumbuhnya daya saing sumber daya Kecamatan menuntut peningkatan sumber daya manusia melalui Real Time Pelayanan di Kecamatan Semboro dengan memanfaatkan potensi dan peluang

serta mendongkrak Kabupaten Jember sebagai Pusat Kabupaten Pelayanan Jasa Terpadu.

- e. Tuntutan reformasi diberbagai bidang kehidupan khususnya dalam menentukan kebijakan yang berpihak kepada masyarakat yang merupakan amanah.
- f. Pemberian Pelayanan kepada masyarakat secara maksimal tanpa komplain sebagai instansi Pembina penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

Peluang

Peluang yang sangat mendukung kelancaran Kecamatan Semboro dalam pencapaian visi dan misinya antara lain :

- a. Perubahan paradigma sistem pemerintahan demokratis berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan di Daerah dan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah, dapat meningkatkan peran Kecamatan Semboro dalam perencanaan pembangunan dan mendorong peningkatan partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan daerah.
- b. Perubahan Paradigma juga terjadi pada Permendagri Nomor 13 tahun 2010 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah bahwa Kecamatan sebagai SKPD.
- c. Adanya kepercayaan dari pimpinan daerah dan masyarakat kepada Kecamatan Semboro untuk memacu dan memotivasi serta merespon tantangan dan permasalahan di masa depan.
- d. Dukungan struktur Stakeholder yang terkait dengan perencanaan daerah cukup tinggi, nampak jelas dari tingkat aktifitas dalam menghadiri undangan setiap kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan oleh Kecamatan Semboro.

- e. Terbukanya kesempatan untuk meningkatkan kualitas SDM melalui peningkatan pendidikan formal, pendidikan latihan dalam dan luar negeri bagi setiap pegawai.

BAB III
ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

3. 1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas Dan Fungsi Organisasi Perangkat Daerah

Permasalahan yang dihadapi Kecamatan Semboro :

1. Sarana dan Prasarana :

- a. Perlunya penambahan kendaraan operasional roda dua untuk menunjang kegiatan operasional yang volume kerjanya semakin bertambah;
- b. Masih kurangnya sarana dan prasarana kantor seperti komputer, printer, kursi rapat, lemari arsip, Gudang dan Penyimpanan Barang Aset-aset Daerah dan peralatan penunjang lainnya untuk kelancaran kegiatan.

2. Aparatur :

Masih kurangnya tenaga staf, khususnya di bidang Pelayanan Masyarakat dan yang menguasai komputer mengingat volume kerja semakin bertambah.

3. Realisasi Kegiatan :

- a. Belum berpengalamannya Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan dalam mengelola kegiatan dan hal ini merupakan hal yang baru bagi aparatur kecamatan;
- b. Belum adanya tenaga teknis dalam mengelola kegiatan khususnya kegiatan yang berhubungan dengan fisik;
- c. Terbatasnya Sumber Daya Manusia dalam mengelola kegiatan.

3. 2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Visi RPJMD Kabupaten Jember Tahun 2016-2020 yaitu : “Jember Bersatu (Bersinergi) Menuju Masyarakat Makmur, Sejahtera, Berkeadilan dan Mandiri” mengandung makna sebagai berikut:

- Mandiri mengandung arti berdikari, berprinsip dan usaha keras
- Bersinergi yang berbasis pada 2 hal, yaitu berkelanjutan dan pemerataan untuk mewujudkan Kabupaten Jember yang harmonis secara sosial budaya, ekonomi, hukum, politik, lingkungan Hidup.

Misi Pembangunan Kabupaten Jember Tahun 2016-2021 dalam rangka mewujudkan “Jember Bersatu (Bersinergi) Menuju Masyarakat Makmur, Sejahtera, Berkeadilan dan Mandiri” adalah sebagai berikut :

- (1) Melaksanakan Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik.
- (2) Mewujudkan Pemenuhan Kebutuhan Dasar Masyarakat yang Berkeadilan
- (3) Meningkatkan Pembangunan Ekonomi Kerakyatan yang Mandiri dan Berdaya Saing, Berbasis Agrobisnis/Agro-industri dan Industrialisasi Secara Berkelanjutan.

3. 3. Telaahan Perubahan Renstra

Visi RPJMD Kabupaten Jember Tahun 2016-2021 yaitu : “Jember Bersatu (Bersinergi) Menuju Masyarakat Makmur, Sejahtera, Berkeadilan dan Mandiri” didukung dengan misi pertama Melaksanakan Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik, mempunyai sasaran :

1. Tercapainya reformasi birokrasi dalam upaya meningkatkan Pelayanan Masyarakat
2. Tercapainya reformasi birokrasi dalam upaya meningkatkan kinerja Aparatur Pemerintah Kabupaten Jember

Dalam rangka “Tercapainya reformasi birokrasi dalam upaya meningkatkan Pelayanan Masyarakat”, dan “Tercapainya reformasi birokrasi dalam upaya meningkatkan Kinerja Aparatur Pemerintah Kabupaten Jember”, terdapat faktor penghambat berupa:

1. Kinerja staf masih belum optimal
2. Masih rendahnya Sumber Daya Manusia (SDM)
3. Kesejahteraan aparatur belum memadai
4. Sarana kerja masih kurang memadai

Sedangkan Faktor Pendorong adalah :

1. Dukungan, Komitmen dan pembinaan oleh atasan /pimpinan
2. Dana yang tersedia
3. Adanya tanggung jawab untuk melaksanakan dan menyelesaikan tugas

3. 4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Strategis

3.4.1. TELAAHAN RTRW

Peraturan perundang-undangan Tata Ruang Wilayah merupakan induk dari semua peraturan perundang-undangan sektoral mengingat dalam Rencana Tata Ruang telah mengatur seluruh aspek pembangunan. Dalam rangka penataan ruang di Kabupaten Jember telah ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 1 tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Jember tahun 2015 – 2035. Secara umum Rencana Tata Ruang Wilayah telah mengatur tentang Rencana Struktur Ruang Wilayah dan Rencana Pola Ruang Wilayah.

Rencana Struktur Ruang Wilayah terdiri atas rencana sistim pusat kegiatan dan rencana sistim jaringan prasarana wilayah. Berdasarkan rencana sistim pusat kegiatan suatu wilayah Kecamatan Semboro termasuk kedalam Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) yang memiliki fungsi utama pengembangan kawasan meliputi pusat pemerintahan, pusat kesehatan, pusat pendidikan, pusat perdagangan dan jasa.

Sedangkan rencana sistim jaringan prasarana wilayah terdiri atas sistim jaringan utama yang meliputi sistim jaringan transportasi darat, sistim jaringan transportasi laut, sistim jaringan sungai, danau dan penyeberangan serta sistim jaringan prasarana lainnya yang meliputi sistim jaringan prasarana energy, sistim jaringan prasarana telekomunikasi, sistim jaringan prasarana sumber daya air dan sistim jaringan prasarana lingkungan.

Sedangkan Rencana Pola Ruang Wilayah terdiri atas Kawasan Peruntukan untuk fungsi kawasan lindung dan kawasan peruntukan budidaya. Hal ini mengindikasikan bahwa rencana pola ruang pada dasarnya merupakan zonasi terhadap pemanfaatan suatu wilayah. Kawasan peruntukan untuk fungsi kawasan lindung meliputi kawasan hutan lindung, kawasan yang memberikan perlindungan kawasan bawahannya, Kawasan perlindungan setempat, kawasan suaka alam, pelestarian alam dan cagar budaya, kawasan rawan bencana alam dan kawasan lindung geologi. Sedangkan peruntukan untuk Budidaya terdiri atas kawasan peruntukan hutan produksi, kawasan peruntukan hutan rakyat, kawasan peruntukan pertanian, kawasan peruntukan perkebunan, kawasan peruntukan peternakan, kawasan peruntukan perikanan, kawasan peruntukan pertambangan, kawasan peruntukan pariwisata, kawasan peruntukan industri, kawasan peruntukan permukiman dan kawasan peruntukan lainnya meliputi pertahanan dan keamanan, kawasan perdagangan dan jasa, kawasan pemerintahan dan kawasan sektor informal

Pengelolaan tata ruang pada hakekatnya merupakan suatu upaya dalam rangka merencanakan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang agar didalam pelaksanaan pembangunan dapat terwujud suatu lingkungan yang produktif, aman dan berkelanjutan. Oleh karena itu dari sisi perencanaan dan pemanfaatan ruang perlu mengacu pada ketentuan-ketentuan yang berlaku terkait dengan struktur ruang dan pola ruang sehingga akan dihasilkan pemanfaatan ruang yang sesuai dengan peruntukannya.

3.4.2. TELAAHAN KLHS

Kajian Lingkungan Hidup Strategis adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan

berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program. Lain halnya dengan AMDAL yang pada hakekatnya merupakan analisis dampak terhadap lingkungan sebagai akibat pelaksanaan suatu kegiatan. Sedangkan KLHS merupakan analisis terhadap kebijakan, rencana dan program pembangunan yang dimungkinkan bisa menimbulkan dampak terhadap lingkungan, sebagai instrumen untuk meningkatkan kualitas kajian kebijakan rencana dan program pembangunan serta lebih mengedepankan aspek deliberative artinya setiap langkah melibatkan pihak terkait.

KLHS bersifat tematik artinya bahwa setiap kebijakan, rencana dan program pembangunan wajib memiliki kajian lingkungan hidup strategis. Beberapa kajian rencana pembangunan yang wajib memiliki KLHS diantaranya adalah Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Nasional, Provinsi dan Kabupaten/Kota beserta rencana rincinya berupa RDTR, Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP), Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nasional, Provinsi dan Kabupaten/Kota serta kebijakan rencana dan/atau program pembangunan nasional dan daerah yang berpotensi menimbulkan dampak dan/atau resiko lingkungan hidup.

3.5. Isu Strategis Kecamatan Semboro

Isu-isu Strategis yang diterapkan dalam RPJM daerah Kabupaten Jember berdasarkan kondisi obyektif dan fakta permasalahan yang ada dan menjadi dasar dalam perumusan strategi arah kebijakan pembangunan yaitu :

1. Penanganan Infrastruktur, penataan Kota dan Lingkungan Hidup
2. Pembangunan Sumber daya Manusia di semua bidang
3. Membangun daya saing Perekonomian
4. Kemiskinan dan sosial Kemasyarakatan
5. Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah dan Kualitas Pelayanan Publik.

BAB IV

VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN, STRATEGIS DAN KEBIJAKAN

4.1. Visi dan Misi SKPD

Dengan memperhatikan Tugas Pokok dan Fungsi yang dimiliki serta kondisi dan proyeksi yang diinginkan ke depan serta mengacu pada Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten yaitu “Jember bersatu menuju masyarakat makmur, sejahtera, berkeadilan, dan mandiri”, maka Visi Kecamatan Semboro Kabupaten Jember, adalah :

“JEMBER BERSATU MENUJU MASYARAKAT MAKMUR, SEJAHTERA, BERKEADILAN DAN MANDIRI”

Visi yang telah ditetapkan di atas dapat dijadikan sebagai acuan dalam pengembangan strategi dan aktivitas dalam organisasi. Untuk hal itu dibutuhkan misi. Misi Kecamatan Semboro yang disusun sebagai penjabaran visi di atas adalah sebagai berikut :

- Melaksanakan Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik

4.2. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah SKPD

Misi 1 : “Melaksanakan Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik.”

Tujuan dari Misi 1 :

Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance), dan bersih (clean government) serta profesionalitas pelayanan publik dalam rangka mewujudkan “JEMBER KUAT DAN BERSIH.”

Sasaran :

Meningkatnya kualitas kelembagaan dan kapabilitas penyelenggaraan pemerintahan ,khususnya pemerintahan kecamatan dan Kelurahan dalam upaya meningkatkan pelayanan publik..

Dengan Indikator sarannya adalah Prosentase Kecamatan Semboro yang menjalankan pelayanan publik bernilai B Survey Kepuasan Masyarakat (IKM).

4.3. Startegi dan Kebijakan SKPD

Strategi dan kebijakan yang dilaksanakan dalam rangka pencapaian Visi, Misi, tujuan dan sasaran Kecamatan Semboro tahun 2016-2021 adalah sebagai berikut:

Strategi :

- Fasilitasi dan Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan di Kecamatan

Kebijakan :

- Peningkatan Kualitas Layanan dan Koordinasi di tingkat Kecamatan.

BAB V
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA,
KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

5.1. Rencana Program Kerja

Kecamatan Semboro untuk menyelenggarakan Tugas Pokok dan fungsinya dan dalam rangka pencapaian RPJMD Kabupaten Jember Tahun 2016-2021, mempunyai 10 (sepuluh) Program yang akan dijabarkan dalam bentuk kegiatan untuk dilaksanakan setiap tahunnya. Adapun Program Kecamatan Semboro yang disusun berdasarkan kewenangan yang dilimpahkan oleh Kabupaten Jember yang berorientasi pada visi dan misi adalah sebagai berikut:

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
3. Program peningkatan Disiplin Aparatur
4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
5. Program Pembangunan Jalan dan Jembatan
6. Program Penataan Administrasi Kependudukan
7. Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak
8. Program Pemberdayaan Masyarakat untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan
9. Program Perencanaan Pembangunan Daerah.
10. Program Koordinasi Pemerintahan, Pembangunan, dan Penyelenggaraan Pemerintahan Wilayah Kecamatan
11. Program Penyelenggaraan Pelayanan Umum Kecamatan

5.2. Kegiatan

Kegiatan merupakan penjabaran dari program, diupayakan pelaksanaannya secara optimal untuk mencapai visi dan misi Kecamatan Semboro selama 5 (lima) tahun, Adapun Kegiatan yang dimaksud adalah sebagai berikut :

Program	Kegiatan
1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	<ol style="list-style-type: none">1. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik2. Penyediaan Alat Tulis Kantor3. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor4. Rapat-Rapat Koordinasi, Konsultasi Dalam Daerah5. Penunjang Pelayanan Administrasi Perkantoran
2. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	<ol style="list-style-type: none">1. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor2. Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan3. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional4. Kegiatan rehabilitasi sedang/berat gedung kantor
3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur	<ol style="list-style-type: none">1. Pengadaan Pakaian Kerja/Pakaian Olahraga2. Penyelenggaraan Peringatan dan Upacara Hari Besar Nasional
4. Program Peningkatan	<ol style="list-style-type: none">1. Kegiatan Penyusunan RKA dan RAPBD

Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	SKPD.
5. Program Pembangunan Jalan dan Jembatan	1. Pembangunan Jalan
6. Program Penataan Administrasi Kependudukan	1. Implementasi Sistem Administrasi Kependudukan
7. Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak	1. Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak
8. Program Pemberdayaan Masyarakat untuk Menjaga Keamanan dan Ketertiban	1. Pembentukan Satuan Keamanan Lingkungan di Masyarakat
9. Program Perencanaan Pembangunan	1. Pengembangan Partisipasi Masyarakat dalam Perumusan Program dan Kebijakan Layanan Publik
10. Program Koordinasi Pemerintahan, Pembangunan, dan Penyelenggaraan Pemerintahan Wilayah Kecamatan	1. Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan 2. Koordinasi Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Sosial 3. Penyelenggaraan Ketertiban dan Keamanan Umum
11. Program Penyelenggaraan Pelayanan Umum Kecamatan	1. Kegiatan Koordinasi Pelayanan Umum

Untuk lebih jelasnya dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan tersebut supaya terukur dan terarah dapat dilihat sebagaimana tabel 5.1 berikut :

BAB VI

INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

Agar perencanaan kinerja yang telah disusun diatas dapat terlaksana dengan baik dan terarah maka perlu ditetapkan indikator kegiatan tersebut yang antara lain meliputi input, output dan outcome serta rencana besaran pagu yang digunakan untuk melaksanakan kegiatan tersebut sebagaimana terlihat pada tabel 6.1 berikut:

BAB VII

PENUTUP

Rencana Strategis Perubahan Kecamatan Semboro Tahun 2016-2021 disusun mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Jember Tahun 2016-2021, sebagai suatu dokumen Perencanaan Strategis dan menjadi acuan bagi penyusunan perencanaan Kinerja tahunan berturut-turut tahun 2016 hingga tahun 2021.

Penyusunan Rencana Strategis Perubahan Kecamatan Semboro Kabupaten Jember Tahun 2016-2021 berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang pelaksanaan Peraturan Menteri Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

Dalam melaksanakan Visi dan Misi yang telah ditetapkan Kecamatan Semboro Kabupaten Jember tidak menjadikan faktor Kelemahan sebagai kendala tetapi menjadikan hal tersebut sebagai kunci keberhasilan yakni memanfaatkan secara optimal jumlah personil yang kurang memadai dan memanfaatkan sarana dan prasarana yang ada seefektif mungkin serta mengkoordinasikan apabila terjadi kendala/ permasalahan pada saat pelaksanaan tugas-tugas.

Demikian Perubahan Renstra ini disusun dan juga didasari masih terdapat kekurangan. Oleh karena itu mohon kiranya kritik dan saran untuk kesempurnaan selanjutnya.

Camat Semboro,


DARYANTO SE. Msi
Pembina Tk. I

NIP. 19670503-199901 1 002

TABEL 4.1
MATRIK TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN
KECAMATAN SEMBORO

A

No.	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Kinerja Sasaran Pada Tahun						Strategi mencapai Tujuan dan Sasaran		
					2016	2017	2018	2019	2020	2021	Strategi	Kebijakan	Program
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Meningkatkan Kualitas Kelembagaan dan Kapabilitas Penyelenggara Pemerintahan Khususnya Pemerintahan Kecamatan dan Desa	Hasil Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)	Meningkatnya Kualitas Pelayanan	Hasil Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) pada bidang Pelayanan Publik	B	B	B	B	B	B	Orientasi Pelayanan Publik berbasis Kepuasan Masyarakat	Peningkatan dukungan bagi peningkatan kapasitas/kinerja pelayanan publik	Program penyelenggaraan pelayanan umum
2	Meningkatkan Koordinasi pemerintahan dan penyelenggara pemerintahan Desa	Prosentasi rekomendasi hasil bidang pemerintahan, ketertiban dan keamanan, pemberdayaan masyarakat dan Kesos yang ditindaklanjuti dalam satu tahun	Meningkatnya koordinasi Pemerintahan dan penyelenggara pemerintahan Desa	Prosentasi rekomendasi hasil bidang pemerintahan, ketertiban dan keamanan, pemberdayaan masyarakat dan Kesos yang ditindaklanjuti dalam satu tahun	80	80	80	80	80	80	Optimalisasi Kegiatan bersama penyelenggara pemerintah dan masyarakat	Membangun koordinasi antar penyelenggara pemerintahan dan masyarakat	Program Koordinasi Pembinaan dan Penyelenggaraan Pemerintahan, Ketertiban dan Keamanan, Pemberdayaan masyarakat dan Kesos
		Prosentase Desa yang sudah menyusun dokumen perencanaan dengan benar dan tepat waktu		Prosentase Desa yang sudah menyusun dokumen perencanaan dengan benar dan tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%	100%			

CAMAT SEMBORO

DARYANTO, SE.Msi.
 Pembina k.l

NIP. 19670503 199901 1 002

LAMPIRAN 1. RENCANA STRATEGIS (RENSTRA 2016-2021)

OPD KECAMATAN SEMBORO

KABUPATEN JEMBER

No.	Sasaran	No.	Indikator Sasaran	Kode rekening Program	Program dan Kegiatan	Indikator kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan 2015	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir Periode Renstra OPD		Unit Kerja SKPD Penanggung jawab	Lokasi				
								Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021				Target	Rupiah		
								target	Rupiah	target	Rupiah	target	Rupiah	target	Rupiah	target	Rupiah	target	Rupiah						
1	Meningkatnya kualitas kelembagaan dan kapabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah, khususnya pemerintahan kecamatan dan desa/kelurahan dalam upaya meningkatkan pelayanan publik;	1	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat	4.01.25.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase tingkat pemenuhan kebutuhan dasar operasional SKPD	100%	100%	140.170.000	100%	150.471.000	100%	150.471.000	100%	154.871.000	100%	157.271.000	100%	17.500.000	100%	770.754.000				
				4.01.25.01.02	Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	% tingkat pemenuhan jasa telepon, listrik, dan internet	100%	100%	21.600.000	100%	24.000.000	100%	24.000.000	100%	24.000.000	100%	24.000.000	100%	26.000.000	100%	143.600.000	Sekretariat	Kec. Semboro		
				4.01.25.01.10	Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor	% tingkat pemenuhan ATK untuk pelayanan	100%	100%	14.799.000	100%	15.500.000	100%	15.500.000	100%	16.300.000	100%	16.300.000	100%	12.500.000	100%	90.899.000	Sekretariat	Kec. Semboro		
				4.01.25.01.13	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor	100%		10	127.500.000	10	150.000.000	10	150.000.000	10	150.000.000	10	150.000.000	50	727.500.000	Sekretariat	Kec. Semboro			
				4.01.25.01.20	Kegiatan Rapat-Rapat Koordinasi, Konsultasi Dalam Daerah	Jumlah rapat koordinasi yang diadakan	12	12	14.400.000	12	14.400.000	12	14.400.000	12	18.000.000	12	18.000.000	12	18.000.000	100%	97.200.000	Sekretariat	Kec. Semboro		
				4.01.25.01.27	Kegiatan Penunjang Administrasi dan Operasional Turin kantor/kehidasan	% tingkat pemenuhan honorarium dan belanja barang jasa	100%	100%	89.371.000	100%	137.295.000	100%	144.159.750	100%	151.367.738	100%	158.936.124	100%	166.882.931	100%	848.012.542	Sekretariat	Kec. Semboro		
				4.01.25.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	% tingkat pemenuhan kebutuhan dan pemeliharaan prasarana	100%	100%	130.300.000	100%	80.300.000	100%	131.300.000	100%	82.200.000	100%	132.700.000	100%	132.700.000	100%	689.500.000				
				4.01.25.02.22	Kegiatan pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor	% tingkat pemenuhan pemeliharaan gedung kantor	100%	100%	7.000.000	100%	7.000.000	100%	8.000.000	100%	9.000.000	100%	9.500.000	100%	10.000.000	100%	50.500.000	Sekretariat	Kec. Semboro		
				4.01.25.02.23	Kegiatan pemeliharaan rutin/ berkala mobil jabatan	Jumlah mobil jabatan yang mendapat perawatan	1	1	44.100.000	1	44.100.000	1	44.100.000	1	45.000.000	1	45.000.000	1	45.000.000	100%	267.300.000	Sekretariat	Kec. Semboro		
				4.01.25.02.24	Kegiatan pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/ operasional	Jumlah mobil dinas yang mendapat perawatan	1	1	29.200.000	1	29.200.000	1	29.200.000	1	29.200.000	1	29.200.000	1	29.200.000	100%	175.200.000	Sekretariat	Kec. Semboro		
				4.01.25.02.42	Kegiatan rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	Jumlah gedung kantor yang diperbaiki	1	1	50.000.000											100%	50.000.000	Sekretariat	Kec. Semboro		
				4.01.25.03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	prosentase tingkat disiplin aparatur	100%	100%	20.450.000	100%	20.450.000										100%	40.900.000			
				4.01.25.03.03	Kegiatan pengadaan pakaian kerja lapangan/ pakaian korpri/ pakaian olah raga/ pakaian khusus hari-hari tertentu	Jumlah pakaian olah raga	40	45	13.500.000												100%	13.500.000	Seksi Pemerintahan	Kec. Semboro	
				4.01.25.03.05	Kegiatan penyelenggaraan peringatan dan upacara hari-hari besar nasional	Jumlah penyelenggaraan upacara hari-hari besar nasional	1	1	6.950.000	1	6.950.000										100%	13.900.000	Seksi Pol PP	Kec. Semboro	
				4.01.25.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	% Laporan yang tepat				100%	5.000.000	100%	5.000.000	100%	5.000.000	100%	5.000.000	100%	5.000.000	100%	5.000.000	100%	25.000.000		
				4.01.25.06	Kegiatan Penyusunan RKA dan RAPBD SKPD	% Tertib Laporan akuntabilitas kinerja				100%	5.000.000	100%	5.000.000	100%	5.000.000	100%	5.000.000	100%	5.000.000	100%	5.000.000	100%	25.000.000	Subag Perencanaan dan Keuangan	Kec. Semboro
1.03.1.20.31.15	Program Pembangunan Jalan dan Jembatan	Jumlah Jembatan yang dilakukan rehabilitasi/ pemeliharaan	6	6	300.000.000												100%	300.000.000							
1.03.1.20.31.15.03	Kegiatan Pembangunan jalan	Jumlah Lokasi		6	300.000.000												100%	300.000.000	Seksi PMD Kesos	Kec. Semboro					
1.10.1.20.31.15	Program Penataan Administrasi Kependudukan	Jumlah jenis dokumen administrasi kependudukan yang dilayani kecamatan	6	100%	110.000.000	100%	110.000.000										100%	220.000.000							
1.10.1.20.31.15.03	Kegiatan Implementasi sistem administrasi kependudukan (membangun, updating, dan pemeliharaan)	Jumlah pelayanan publik yang dilayani.	90%	100%	110.000.000	100%	110.000.000										100%	220.000.000	Seksi Pelayanan Umum	Kec. Semboro					

No.	Sasaran	No.	Indikator Sasaran	Kode rekening Program	Program dan Kegiatan	Indikator kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan 2015	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir Periode Renstra OPD		Unit Kerja SKPD Penanggung jawab	Lokasi		
								Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021				Target	Rupiah
								target	Rupiah	target	Rupiah	target	Rupiah	target	Rupiah	target	Rupiah	target	Rupiah				
				1.11.1.20.31.16	Program Penguatan Kelembagaan	Prosentase peningkatan kader PKK	90%	85%	30.000.000	85%	30.000.000							100%	60.000.000				
				1.11.1.20.31.16.05	Kegiatan Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak	Prosentase kader PKK aktif	80%	85%	30.000.000	85%	30.000.000							100%	60.000.000	Seksi PMD Kesos	Kec. Semboro		
				1.19.1.20.31.19	Program Pemberdayaan Masyarakat untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan	% Prosentase masyarakat yang dibina dalam menjaga ketertiban masyarakat	80%	80%	147.649.000	90%	150.000.000							100%	297.649.000				
				1.19.1.20.31.19.01	Kegiatan Pembentukan Satuan Keamanan Lingkungan di Masyarakat	Rasio Jumlah Pol PP terhadap jumlah Desa	75%	12.06	147.649.000	12.06	147.649.000							100%	295.298.000	Seksi Pol PP	Kec. Semboro		
				1.06.1.20.31.21	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Prosentase ketersediaan dokumen perencanaan	12.06	100%	3.400.000	100%	4.000.000							100%	7.400.000				
				1.06.1.20.31.21.01	Kegiatan pengembangan partisipasi masyarakat dalam perumusan program dan kebijakan layanan publik	Jumlah penyelengga-raan Musrenbang tingkat kecamatan	100%	1	3.400.000	1	4.000.000							100%	7.400.000	Seksi PMD Kesos	Kec. Semboro		
				4.01.25.32	Program Koordinasi Pemerintahan, Pembangunan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Wilayah Kecamatan	Prosentase penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan						100%	218.104.000	100%	229.009.000	100%	240.453.000	100%	252.471.000	100%	940.037.000		
					Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan	Terlaksananya Rakor tingkat Kecamatan dan Sosialisasi						100%	28.180.000	100%	29.589.000	100%	31.068.000	100%	32.621.000	100%	121.458.000	Seksi Pemerintahan	Kec. Jelbuk
					Koordinasi Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Sosial	Terlaksananya Musrenbang dan Pelatihan Kader PKK						100%	34.000.000	100%	35.700.000	100%	37.485.000	100%	39.350.000	100%	146.535.000	Seksi PMD Kesos	Kec. Semboro
					Koordinasi Penyelenggaraan Ketertiban dan Keamanan Umum	Terbayarnya Honor, Uang Lembur Banpol PP dan penyelenggaraan Upacara Hari Besar Nasional						100%	155.924.000	100%	163.720.000	100%	171.900.000	100%	180.500.000	100%	672.044.000	Seksi Trantib	Kec. Semboro
				4.01.25.33	Program Penyelenggaraan Pelayanan Umum Kecamatan	Prosentase pelayanan umum						100%	60.180.000	100%	63.189.000	100%	66.348.000	100%	69.665.000	100%	259.382.000		
					Koordinasi Pelayanan Umum	Prosentase terwujudnya pelayanan umum di Kecamatan						100%	60.180.000	100%	63.189.000	100%	66.348.000	100%	69.665.000	100%	259.382.000	Seksi Pelayanan Umum	Kec. Semboro



NIP. 19670503 199901 1 002

Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja SKPD Penanggung jawab	Lokasi	
				Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021				
				target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
1.10.1.20.31.15.03	Kegiatan Implementasi sistem administrasi kependudukan (membangun, updating, dan pemeliharaan)	Jumlah pelayanan publik yang dilayani.	0,9	1	110000000	100%	110.000.000										Seksi Pelayanan Umum	Kec. Semboro
1.11.1.20.31.16	Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak	Prosentase peningkatan kader PKK	0,9	0,85	30000000	85%	30.000.000											
1.11.1.20.31.16.05	Kegiatan Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak	Prosentase kader PKK aktif	0,8	0,85	30000000	85%	30.000.000										Seksi PMD Kesos	Kec. Semboro
1.19.1.20.31.19	Program Pemberdayaan Masyarakat untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan	% Prosentase masyarakat yang dibina dalam menjaga ketertiban masyarakat	0,8	0,8	147.649.000	0,9	150.000.000											
1.19.1.20.31.19.01	Kegiatan Pembentukan Satuan Keamanan Lingkungan di Masyarakat	Rasio Jumlah Pol PP terhadap jumlah Desa	0,75	0,5041667	147.649.000	0,50417	147.649.000										Seksi Pol PP	Kec. Semboro
1.06.1.20.31.21	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Prosentase ketersediaan dokumen perencanaan	50%	100%	3.400.000	100%	4.000.000											
1.06.1.20.31.21.01	Kegiatan pengembangan partisipasi masyarakat dalam perumusan program dan kebijakan layanan publik	Jumlah penyelenggara-raan Musrenbang tingkat kecamatan	100%	100%	3.400.000	100%	4.000.000										Seksi PMD Kesos	Kec. Semboro
4.01.25.32	Program Koordinasi Pemerintahan, Pembangunan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Wilayah Kecamatan	Prosentase penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan						100%	218.104.000	100%	229.009.000	100%	240.453.000	100%	252.471.000			
	Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan	Terlaksananya Rakor tingkat Kecamatan dan Sosialisasi						100%	28.180.000	100%	29.589.000	100%	31.068.000	100%	32.621.000		Seksi Pemerintahan	Kec. Jelbuk
	Koordinasi Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Sosial	Terlaksananya Musrenbang dan Pelatihan Kader PKK						100%	34.000.000	100%	35.700.000	100%	37.485.000	100%	39.350.000		Seksi PMD Kesos	Kec. Semboro
	Koordinasi Penyelenggaraan Ketertiban dan Keamanan Umum	Terbayarnya Honor, Uang Lembur Banpol PP dan penyelenggaraan Upacara Hari Besar Nasional						100%	155.924.000	0,00	163.720.000	100%	171.900.000	100%	180.500.000		Seksi Trantib	Kec. Semboro
4.01.25.33	Program Penyelenggaraan Pelayanan Umum Kecamatan	Prosentase pelayanan umum						100%	60.180.000	100%	63.189.000	100%	66.348.000	100%	69.665.000			
	Koordinasi Pelayanan Umum	Prosentase terwujudnya pelayanan umum di Kecamatan						1	60.180.000	1	63.189.000	1	66.348.000	1	69.665.000		Seksi Pelayanan Umum	Kec. Semboro



NIP. 19670503 199901 1 002

TABEL 6.1
INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

No.	Indikator	Program dan Kegiatan	Indikator kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD
				Tahun 0	Tahun 1	Tahun 2	Tahun 3	Tahun 4	Tahun 5	
1	% Kecamatan yg menjalankan pelayanan publik bernilai B Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase tingkat pemenuhan kebutuhan dasar operasional SKPD	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	% tingkat pemenuhan jasa telepon, listrik, dan internet	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor	% tingkat pemenuhan ATK untuk pelayanan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		Kegiatan Rapat-Rapat Koordinasi, Konsultasi Dalam Daerah	Jumlah rapat koordinasi yang diadakan	12	12	12				
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor								
		Kegiatan Penunjang Administrasi dan Operasional Turin kantor/kedinasan	% tingkat pemenuhan honorarium dan belanja barang jasa	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	% tingkat pemenuhan kebutuhan dan pemeliharaan prasarana	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		Kegiatan pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor	% tingkat pemenuhan pemeliharaan gedung kantor	100%	100%	100%	100%	100%	%	100%
		Kegiatan pemeliharaan rutin/ berkala mobil jabatan	Jumlah mobil jabatan yang mendapat perawatan	1	1	1	1	1	1	5
		Kegiatan pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/ operasional	Jumlah mobil dinas yang mendapat perawatan	1	1	1	1	1	1	5
		Kegiatan rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	Jumlah gedung kantor yang diperbaiki	1	1					
		Program Peningkatan Disiplin Aparatur	prosentase tingkat disiplin aparatur	100%	100%	100%				100%
		Kegiatan pengadaan pakaian kerja lapangan/ pakaian korpri/ pakaian olah raga/ pakaian khusus hari-hari tertentu	Jumlah pakaian olah raga	40	45					
		Kegiatan penyelenggaraan peringatan dan	Jumlah penyelenggara-raan upacara hari-hari	1	1	1				
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	% Laporan yang tepat				100%	100%	100%	100%		
Kegiatan Penyusunan RKA dan RAPBD SKPD	% Tertib Laporan akuntabilitas kinerja				100%	100%	100%	100%		
Program Koordinasi Pemerintahan, Pembangunan, dan Penyelenggaraan Pemerintahan Wilayah Kecamatan	Prosentase penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan				100%	100%	100%	100%		

No.	Indikator	Program dan Kegiatan	Indikator kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD
				Tahun 0	Tahun 1	Tahun 2	Tahun 3	Tahun 4	Tahun 5	
		Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan	Terlaksananya Rakor tingkat Kecamatan dan Sosialisasi				100%	100%	100%	100%
		Koordinasi Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Sosial	Terlaksananya Musrenbang dan Pelatihan Kader PKK				100%	100%	100%	100%
		Penyelenggaraan Ketertiban dan Keamanan Umum	Terbayarnya Honor, Uang Lembur Banpol PP dan penyelenggaraan Upacara Hari Besar Nasional				100%	100%	100%	100%
		Program Penyelenggaraan Pelayanan Umum Kecamatan	Prosentase pelayanan umum				100%	100%	100%	100%
		Kegiatan Koordinasi Pelayanan Umum	Prosentase terwujudnya pelayanan umum di Kecamatan				100%	100%	100%	100%
		Program Pembangunan Jalan dan Jembatan	Jumlah Jembatan yang dilakukan rehabilitasi/ pemeliharaan	6	6					
		Kegiatan Pembangunan jalan	Jumlah Lokasi	6	6					
		Program Penataan Administrasi Kependudukan	Jumlah jenis dokumen administrasi kependudukan yang dilayani kecamatan	90%	100%	100%				
		Kegiatan Implementasi sistem administrasi kependudukan (membangun, updating, dan pemeliharaan)	Jumlah pelayanan publik yang dilayani.	90%	100%	100%				
		Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak	Prosentase peningkatan kader PKK	80%	85%	85%				
		Kegiatan Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak	Prosentase kader PKK aktif	80%	85%	85%				
		Program Pemberdayaan Masyarakat untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan	% Prosentase masyarakat yang dibina dalam menjaga ketertiban masyarakat	75%	80%	90%				
		Kegiatan Pembentukan Satuan Keamanan Lingkungan di Masyarakat	Rasio Jumlah Pol PP terhadap jumlah Desa	12.06	12.06	12.06				
		Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Prosentase ketersediaan dokumen perencanaan	100%	100%	100%				
		Kegiatan pengembangan partisipasi masyarakat dalam perumusan program dan kebijakan layanan publik	Jumlah penyelenggara-raan Musrenbang tingkat kecamatan	1	1	1				



NIP. 19670503 199901 1 002